

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Adapun tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN ada tiga cara dengan manual, elektronik, dan online (E-Filing). Tingkat pelaporan Spt Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sangat tinggi, karena wajib pajak mengetahui apabila SPT Masa PPn nya tidak dilaporkan maka akan di kenakan sanksi/denda sebesar Rp. 500.000,00 pada masa pajak, tingkat kesesuaian praktek dilapangan sudah sesuai dengan undang-undang pajak yang ditetapkan.
2. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak standar dapat dibuat oleh Wajib Pajak sepanjang, bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Satu SSP standar hanya dapat digunakan untuk pembayaran Satu jenis Pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun pajak/surat ketetapan pajak/STP
3. PPN yang terutang dalam satu masa pajak dengan batas akhir penyetoran pajaknya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan batas Pelaporan SPT Masa paling lama 20 hari setelah Masa Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir. Jika Jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan pada hari libur nasional termasuk hari sabtu atau minggu maka, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4. Adapun kendala yang dialami oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam Pembuatan CSV melalui aplikasi, yang akan diberikan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang untuk di rekam dan diarsipkan sehingga petugas kantor mengalami kesulitan dalam merekam data wajib pajak tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak/pelaku usaha yang belum mengerti tentang pengisian CSV dan Faktur Pajak yang akan di laporkan
2. Pelaku usaha yang omzet di atas Rp. 4,8 Miliar pertahun tetapi belum menjadi PKP harus diberikan pembinaan supaya bersedia untuk menjadi PKP aktif
3. Pengawasan terhadap semua transaksi yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih ditingkatkan, sehingga PPN bisa terserap secara maksimal dan mencapai dari target yang di rencanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran untuk Wajib Pajak, yaitu :

1. Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan supaya tidak kebingungan, lebih paham dalam pengisian CSV, Faktur pajak dan bagi Wajib Pajak yang omzet di atas 4,8 miliar supaya bersedia menjadi PKP aktif demi terciptanya keadilan sebagai warga negara yang wajib membayar pajak.